

Pengembangan Wisata Pesisir Berkelanjutan di Gampong Beureunut Melalui Konsep Minapolitan

Halis Agussaini ^{a*}, Zainuddin ^b

^{a,b} Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

Beureunut Village, Seulimeum Subdistrict, Aceh Besar Regency is a coastal area with significant potential for fisheries and tourism, yet remains underutilized. This community service program aims to support coastal tourism development based on the minapolitan concept as a strategy to improve community welfare. Activities were conducted using a participatory approach, beginning with mapping the village's potential, identifying issues, and developing an integrated concept for fisheries and tourism-based area development. Findings reveal that Beureunut Village possesses geographical advantages, biological richness (including eel habitats), and potential for eco-tourism rooted in local culture. Nevertheless, challenges including infrastructure limitations, institutional constraints, and market access remain major obstacles. The program produced a development plan for a coastal tourism-minapolitan area that integrates eco-tourism functions, a fisheries hub, and the empowerment of SMEs based on marine products. Implementation of the concept is expected to boost the local economy and establish a sustainable model for coastal village development.

ABSTRAK

Desa Beureunut, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah pesisir dengan potensi perikanan dan pariwisata yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Program pengabdian masyarakat bertujuan mendukung pengembangan wisata pesisir berbasis minapolitan sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, dimulai dengan pemetaan potensi desa, identifikasi permasalahan, hingga penyusunan konsep pengembangan kawasan berbasis integrasi sektor perikanan dan pariwisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa Gampong Beureunut memiliki keunggulan geografis, kekayaan hayati seperti habitat ikan sidat, serta potensi ekowisata berbasis budaya lokal. Akan tetapi, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kelembagaan, dan akses pasar menjadi hambatan utama. Program menghasilkan rencana pengembangan kawasan wisata-minapolitan yang mengintegrasikan fungsi ekowisata, sentra perikanan, dan pemberdayaan UMKM berbasis hasil laut. Implementasi konsep diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan membentuk model pengembangan desa pesisir berkelanjutan.

ARTICLE HISTORY

Received 16 August 2025

Accepted 1 September 2025

Published 30 October 2025

KEYWORDS

Gampong Beureunut;
Minapolitan; Coastal Tourism;
Community Empowerment.

KATA KUNCI

Gampong Beureunut;
Minapolitan; Wisata Pesisir;
Pemberdayaan Masyarakat.

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.161 kilometer, terpanjang kedua setelah Kanada (Arianto, 2020), dengan luas perairan lebih besar daripada luas daratan sehingga menjadikannya salah satu negara dengan potensi kelautan dan perikanan terbesar di dunia (Rensa, 2020). Akan tetapi, banyak wilayah pesisir di Indonesia justru menghadapi tantangan pembangunan, seperti rendahnya kesejahteraan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, hingga belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal (Suryanti *et al.*, 2019; Arianto, 2020; Kristian, 2021). Permasalahan serupa terjadi di

Gampong Beureunut, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar—sebuah desa pesisir yang kaya sumber daya alam namun belum berkembang secara maksimal. Gampong Beureunut memiliki karakteristik fisik berupa pantai landai, pasir hitam eksotik, muara sungai besar, dan potensi budidaya ikan sidat (*Anguilla* spp.) yang bernilai ekonomi tinggi namun rentan punah akibat eksploitasi berlebih. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan (tangkap dan budidaya), tetapi keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta kapasitas kelembagaan menyebabkan potensi tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara signifikan (Qanun Kabupaten Aceh Besar, 2013).

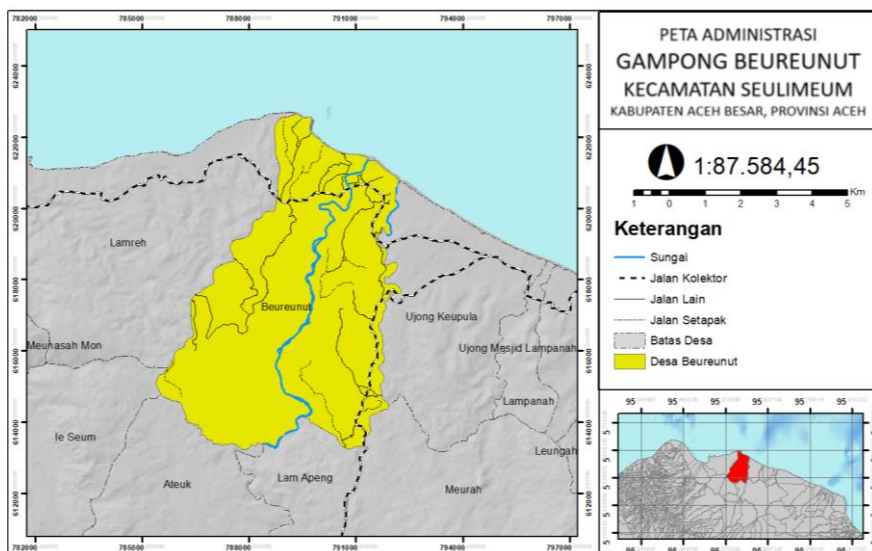
Pendekatan minapolitan menjadi relevan sebagai strategi pengembangan kawasan pesisir terpadu. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010). Integrasi kegiatan perikanan dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran dengan penyediaan infrastruktur, dukungan kelembagaan, dan pelibatan masyarakat lokal. Ketika minapolitan dikombinasikan dengan konsep wisata pesisir berbasis ekologi dan budaya lokal, kawasan seperti Gampong Beureunut berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dan kearifan komunitas.

Pengembangan kawasan tidak dapat dilakukan secara *top-down*. Diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pemetaan potensi, identifikasi permasalahan, perancangan ruang, dan strategi pemberdayaan. Program pengabdian masyarakat dilakukan untuk menjembatani proses perencanaan melalui kajian kondisi eksisting dan penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata pesisir berbasis minapolitan yang aplikatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan penguatan pada sektor wisata dan perikanan, serta integrasi kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, Gampong Beureunut diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai destinasi wisata pesisir, tetapi juga sebagai contoh sukses pembangunan desa berbasis potensi lokal.

2. Metode

2.1 Lokasi Kegiatan

Lokasi pengabdian terletak di Gampong Beureunut, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, berjarak ± 50 kilometer dari Kota Banda Aceh (ibu kota provinsi) dengan luas wilayah 918 hektar. Jumlah penduduk Gampong Beureunut pada tahun 2024 adalah 338 jiwa, terdiri atas 162 jiwa laki-laki dan 176 jiwa perempuan dengan kepadatan 0,37 jiwa/hektar (BPS Kabupaten Aceh Besar, 2024). Peta administrasi Gampong Beureunut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Administrasi Gampong Beureunut

2.2 Sistematika Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi potensi melalui observasi lapangan dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) dengan masyarakat.
- 2) Pemetaan permasalahan, meliputi keterbatasan infrastruktur, akses pemasaran, dan kapasitas kelembagaan.
- 3) Sosialisasi konsep minapolitan dan potensi ekowisata pesisir kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 4) Penyusunan konsep tata ruang kawasan wisata pesisir yang mencakup dermaga nelayan, homestay, dan sentra pengolahan hasil laut.
- 5) Pelatihan dan edukasi bagi masyarakat tentang pengelolaan wisata berkelanjutan dan pengembangan produk lokal.
- 6) Evaluasi dan umpan balik terhadap konsep yang dirancang melalui diskusi partisipatif dengan masyarakat.

3. Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat di Gampong Beureunut menghasilkan beberapa capaian penting yang menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan wisata pesisir berbasis minapolitan. Gampong Beureunut memiliki topografi pesisir dengan bentuk tanjung dan teluk yang relatif aman dari ombak besar. Wilayah ini memiliki pasir hitam yang unik dan sungai besar yang menjadi habitat ikan sidat (*Anguilla spp.*) dengan nilai ekonomi tinggi dan potensi besar untuk budidaya. Potensi tersebut menjadikan kawasan ini layak dikembangkan sebagai destinasi ekowisata dan sentra minapolitan (Gambar 2).

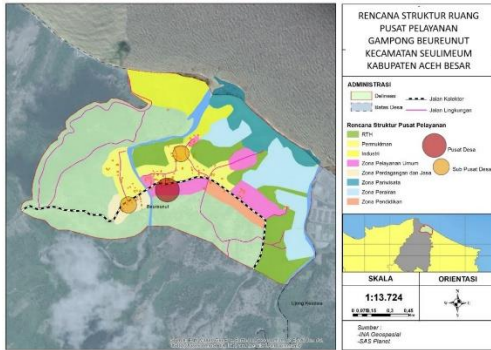


Jenis Lahan	Pantai	Tambak	Permukiman	Sungai	Perkebunan	Hutan
Vegetasi	- Pohon kelapa - Hutan bakau	Tidak ada	- Pohon kelapa - Jambu - Mangga - Belimbing - Cokelat		- Bawang Merah - Terong - Cokelat - Cabai merah - Alpukat - Mangga	Pepohonan berkayu
Pemanfaatan untuk Potensi	Sumber Pendapatan	Sumber pendapatan	Tempat Tinggal	Konsumsi	- Konsumsi - Sumber Pendapatan	Hutan produksi
Masalah	- Sampah yang di bawa ombak - Sampah yang dibuang sembarangan	Terangan Virus dan Penyakit	- Ternak yang tidak dikandangkan - Sanitasi lingkungan - Penataan Permukiman	Banjir bandang	- Serangan hama - Rusak akibat dimakan ternak	Pemanfaatan lahan yang belum maksimal

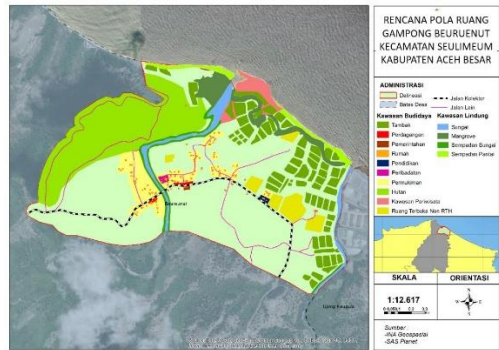
Gambar 2. Transek Gampong Beureunut

Hasil observasi dan diskusi bersama warga menunjukkan bahwa meskipun potensi wilayah cukup besar, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat perkembangan. Infrastruktur dasar seperti jalan, dermaga, dan tempat pelelangan ikan belum memadai. Akses terhadap modal usaha dan pasar hasil laut masih minim, sementara pelatihan teknis budidaya, pengolahan hasil perikanan, serta manajemen wisata masih kurang. Selain itu, belum terdapat integrasi kelembagaan desa seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), kelompok nelayan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung ekosistem wisata-minapolitan. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dan tim pengabdian menyusun konsep pengembangan kawasan dengan prinsip keberlanjutan dan integrasi.

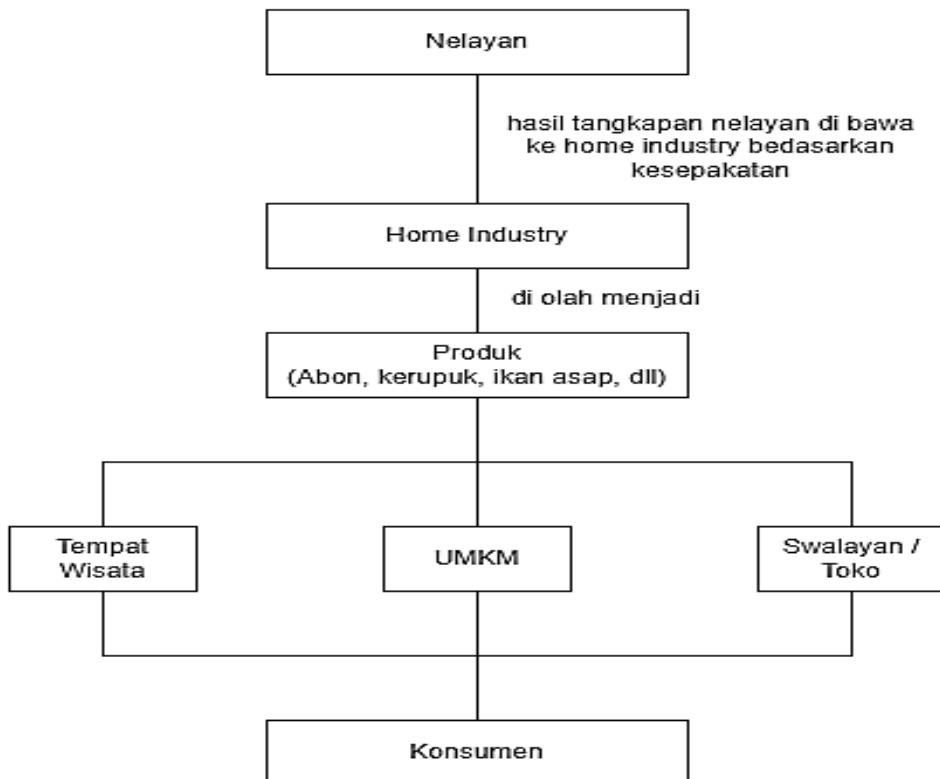
Rancangan strategis yang dihasilkan mencakup zona wisata pantai untuk aktivitas rekreasi, ekowisata mangrove, dan konservasi sidat; zona sentra perikanan dengan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sederhana, *cold storage* komunitas, dan pelatihan pengolahan hasil laut; zona pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal berbasis kuliner laut seperti ikan sidat dan udang, serta penyediaan fasilitas pelatihan oleh BUMG; dan infrastruktur pendukung berupa perbaikan akses jalan, penerangan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Konsep ini divisualisasikan dalam peta rencana struktur ruang, pola ruang, dan pengembangan integratif wisata-minapolitan (Gambar 3, 4, 5, dan 6).



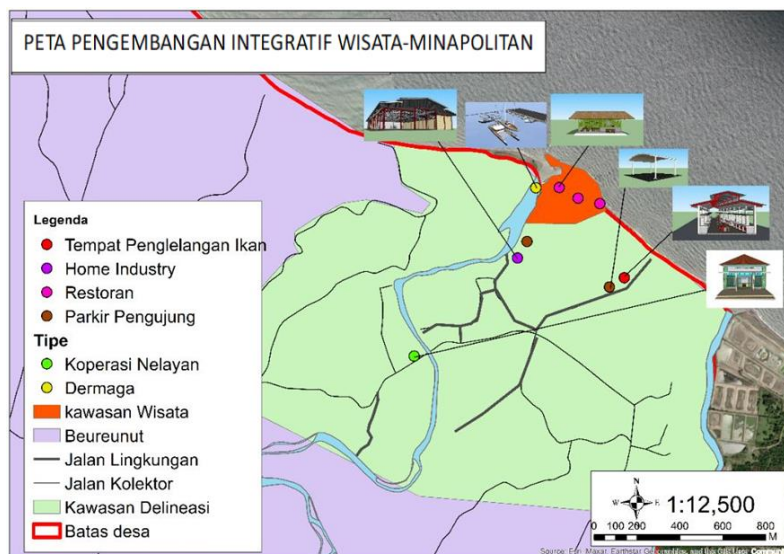
Gambar 3. Peta Rencana Struktur Ruang Gampong Beureunut



Gambar 4. Peta Rencana Pola Ruang Gampong Beureunut



Gambar 5. Konsep Integratif: Wisata Pesisir dan Minapolitan Gampong Beureunut



Gambar 6. Peta Rencana Pengembangan Integratif Wisata-Minapolitan Gampong Beureunut

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui Forum *Group Discussion* (FGD) bersama warga dan perangkat desa untuk pemetaan partisipatif dan penyusunan prioritas pembangunan. Kegiatan pelatihan teknis sederhana juga dilaksanakan, meliputi pembuatan olahan hasil laut, pengemasan produk, dan manajemen kelompok usaha. Simulasi peran kelembagaan lokal dalam pengelolaan kawasan dilakukan untuk memperkuat fungsi BUMG dan kelompok nelayan dalam manajemen dermaga, TPI, dan fasilitas pendukung lainnya.

4. Pembahasan

Pengembangan kawasan wisata pesisir berbasis minapolitan di Gampong Beureunut merupakan upaya strategis untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi geografis berupa topografi tanjung dan teluk memberikan keunggulan komparatif sebagai kawasan yang aman untuk aktivitas wisata bahari dan budidaya perikanan. Keberadaan ikan sidat sebagai komoditas unggulan sejalan dengan konsep minapolitan yang menekankan pada pengembangan ekonomi berbasis perikanan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010). Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan kapasitas kelembagaan. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti dermaga dan TPI menjadi hambatan utama dalam rantai nilai perikanan. Menurut Suryanti *et al.* (2019), ketersediaan infrastruktur perikanan yang memadai merupakan prasyarat bagi pengembangan kawasan minapolitan yang berkelanjutan. Minimnya akses terhadap modal usaha dan pasar juga menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak dapat dipasarkan dengan nilai tambah yang optimal. Oleh karena itu, integrasi antara sektor perikanan dan pariwisata melalui konsep ekowisata pesisir dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam (Kristian, 2021).

Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*). Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemetaan potensi dan penyusunan rencana pengembangan kawasan memastikan bahwa strategi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelatihan teknis yang diberikan tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil laut, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan lokal seperti BUMG dan kelompok nelayan dalam mengelola sumber daya ekonomi desa.

Konsep zonasi yang diusulkan—zona wisata pantai, zona sentra perikanan, dan zona pemberdayaan masyarakat—memberikan kerangka perencanaan yang jelas dan terstruktur. Zonasi ini memungkinkan

pengembangan kawasan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan ketersediaan sumber daya. Integrasi antara aktivitas wisata, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM lokal menciptakan sinergi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu, penyediaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, penerangan, dan sanitasi dasar akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya tarik kawasan bagi wisatawan. Kegiatan pengabdian ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi lokal dan pentingnya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Kerangka perencanaan kawasan wisata-minapolitan yang dihasilkan dapat diajukan dalam program kerja desa atau menjadi dasar kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga donor, maupun sektor swasta. Aktivasi peran kelembagaan lokal dalam diskursus pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi modal sosial yang penting bagi keberlanjutan program di masa mendatang. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, Gampong Beureunut berpotensi menjadi model pengembangan desa pesisir berbasis minapolitan dan ekowisata di Kabupaten Aceh Besar.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Gampong Beureunut memiliki potensi yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata pesisir berbasis minapolitan. Keunggulan geografis, kekayaan hayati, serta budaya lokal yang masih lestari merupakan modal besar dalam mewujudkan pengembangan wilayah berbasis ekonomi perikanan dan pariwisata. Melalui program pengabdian masyarakat, telah dirancang konsep integratif yang menggabungkan sektor perikanan, wisata, dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

Agar konsep pengembangan ini dapat berhasil diterapkan secara berkelanjutan dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, kelembagaan yang kuat dan aktif menjadi kunci keberlanjutan program. Pembentukan dan penguatan kelembagaan desa seperti Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta kelompok nelayan dan UMKM harus menjadi prioritas untuk menjamin keberlanjutan program. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat melalui pelatihan berkelanjutan dalam manajemen wisata, pengolahan hasil laut, pemasaran digital, serta pelestarian lingkungan sangat penting agar masyarakat mampu mengelola potensi secara mandiri dan profesional. Ketiga, pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan ke pantai, tempat pelelangan ikan, fasilitas sanitasi, tempat pengolahan hasil laut, serta *homestay* perlu disiapkan secara bertahap sesuai prioritas. Keempat, perencanaan ruang yang jelas dan partisipatif harus disusun melalui peta zonasi penggunaan ruang yang memisahkan dengan jelas antara zona konservasi, zona wisata, dan zona produksi perikanan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan di masa depan. Kelima, dukungan regulasi dan kemitraan lintas sektor dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta mitra swasta perlu dilibatkan untuk memberikan dukungan regulatif, pendanaan, dan pembinaan usaha. Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat implementasi di lapangan. Keenam, komitmen terhadap keberlanjutan dan konservasi harus menjadi prinsip utama dalam setiap upaya pengembangan, sehingga pengelolaan sumber daya alam tetap lestari serta inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Dengan mempersiapkan keenam aspek tersebut, peluang keberhasilan pengembangan kawasan wisata pesisir berbasis minapolitan akan semakin besar serta mampu menjadi model pembangunan desa pesisir yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020).

Referensi

Arianto, M. F. (2020). Potensi wilayah pesisir di negara Indonesia. *Jurnal Geografi*, 10(1), 204-215..

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2024). *Kecamatan Seulimeum dalam angka 2024*. <https://acehbesarkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/de236ab5ebfb683548b55ab7/kecamatan-seulimeum-dalam-angka-2024.html>

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Panduan pembangunan desa berbasis SDGs desa*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2010). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan*.
- Kristian, I. (2021). Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. *Jurnal Rasi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i1.29>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2020). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633.
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012–2032. (2013).
- Rensa, T. M. (2020). Pembangunan dan pemanfaatan demografi maritim di Indonesia. *Jurnal Wawasan Sosial Budaya Maritim*.
https://www.academia.edu/Documents/in/Jurnal_wawasan_sosial_budaya_maritim
- Suryanti, Supriharyono, & Anggoro, S. (2019). *Pengelolaan wilayah pesisir terpadu*. Undip Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.